



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)

2023

**BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA GORONTALO
TAHUN 2022**

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun kedepan, dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan baik eksternal maupun internal.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo ini, maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Kota Gorontalo mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, dengan mengedepankan skala prioritas, sehingga setiap program dan kegiatan yang telah ditentukan dapat dilaksanakan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan yang telah disusun ini tidak cukup berarti tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Komitmen dan motivasi yang tinggi melaksanakan rencana yang telah tersusun ini. Harapan kami, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam upaya mencapai sasaran – sasaran pembangunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo untuk mendukung arah dan kebijakan pembangunan daerah dalam 1 (satu) tahun kedepan.

Gorontalo, Juli 2023

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO



Drs. H. BEN IDRUS, M.Pd

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Sistematika Penulisan	4
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Semester 1 Tahun 2023	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	32
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	40
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	41
3.3 Program dan Kegiatan	42
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
BAB V. PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

- TC. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo	8
- Tabel 2.2 Analisis Capaian Kinerja Untuk Sasaran Strategis	13
- Tabel 2.3 Pengukuran Nilai Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022	14
- Tabel 3.8 Data PNS Yang Mengikuti Ujian Dinas	15
- Tabel 3.9 Data ASN yang mengikuti Tugas Belajar Tahun 2022	16
- Tabel 3.10 Data Kegiatan Pengembangan Kompetensi BKPP Kota Gorontalo..	18
- Tabel 3.11 Data ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2022	19
- Tabel 3.12 Data Hukuman Disiplin Tahun 2022	21
- Tabel 3.13 Pemberian Penghargaan Satya Lencana dari Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2022	23
- Tabel 3.15 Analisa Capaian Kinerja Untuk Sasaran Strategis	26
- Tabel 3.16 Data Capaian Unsur Pelayanan	26
- Tabel 3.17 Data Survey IKM 2020-2022	28
- Tabel 3.18 Data Layanan Pengurusan Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tahun 2022	29
- Tabel 3.19 Aplikasi Layanan Kepegawaian dan Kegunaannya	29
- TC. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo	31
- TC. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Gorontalo Tahun 2023	36
- TC. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakira Maju Tahun 2025 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo	43
- Tabel 4.1 Program dan Kegiatan BKPP Kota Gorontalo Tahun 2023 Perubahan.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang. Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Gorontalo dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2023

merupakan penjabaran tahun Keempat Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 yang sejalan dengan upaya pencapaian target sasaran sebagaimana tercantum pada Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) Tahun 2023 dari Perubahan RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2019-2023. Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan.

Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah:

- a. adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2023 dengan pagu APBD tahun 2023.
- b. adanya pergeseran pagu sub kegiatan pada rincian sub kegiatan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi yang harus segera dilaksanakan;
- c. adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti antara lain:
 - Pengiriman peserta latsar bagi calon PNS yang diangkat pada tahun 2023 sebanyak 3 orang yang berasal dari lulusan STTD sebanyak 3 orang;
 - Fasilitasi Seleksi PPPK Guru, Tenaga Kesehatan dan Teknis serta;
 - Workshop Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

sehingga dilakukan pergeseran anggaran antar sub kegiatan, antar Kegiatan dan antar program yang diperkirakan tidak akan terserap anggarannya karena kegiatan sudah selesai.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- h. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008 - 2027 (Lembaran Daerah Kota

- i. Gorontalo Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102);
- j. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 – 2024;
- k. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan APBD Tahun 2023. Secara rinci maksud dari penyusunan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Sebagai dokumen perencanaan untuk Perubahan Anggaran Tahun 2023 guna membangun kinerja yang lebih akuntabel.

D. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2023 disusun menurut Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Semester 1 Tahun Anggaran 2023
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAEAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO
TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2023

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo selama Tahun 2023 serta perkiraan target anggaran Tahun 2024. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2023 telah terlewati. Berbagai Program dan Kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu dan pencapaian renstra OPD adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

TC. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Resntra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Thn 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Thn Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja PD (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Thn Berjln(2023 TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra)%)
Urusan									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	53,06%	53,06%
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	100%	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	4 Dokumen	50%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	1 Dokumen	25%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	3 Dokumen	75%
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/Bulan	100%	41 Orang/Bulan	41 Orang/Bulan	100%	41 Orang/Bulan	41 Orang/Bulan	50%
Pelaksanaan Penata usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Umum	100%	105%	100%	100%	100%	100%	43.3%	43.3%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	6 Paket	50%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	6 Paket	50%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	6 Paket	50%
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	6 Paket	50%
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Paket	50%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	113%	30 Laporan	30 Laporan	100%	30 Laporan	9 Paket	30%
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Pegadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	30 Unit	30 Unit	100%	2 Unit	-	0%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	100%	9 Unit	9 Unit	100%		-	0%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	100%	21 Unit	21 Unit	100%	2 Unit	-	0%
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase BMD yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	46.3%	46.3%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	100%	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	3 Unit	42.85%

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	-	0%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	11 Unit	100%	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	6 Unit	50%
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentas ASN berkinerja baik berdasarkan penilaian Prestasi Kerja						96%	35.93%	37.43%
	Persentase Pangkatan ASN dalam Jabatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan organisasi	98%					95%	49.4%	52%
	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	98%	91%				97%	35.28%	36.37%
PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	Persentase ASN yang diangkat Berdasarkan formasi yang ditetapkan	100%	128%	114%	220%	193%	95%		
	Persentase ASN yang diberhentikan sesuai dengan Proyeksi BUP	100%					100%	59%	59%
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaam PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	110 Dokumen	127%	100 Dokumen	201 Dokumen	100%	100 Dokumen	121 Dokumen	121%
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	100%	4 Lembaga	4 Lembaga	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	0%
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
MUTASI DAN PROMOSI ASN	Persentase Mutasi dan Promosi yang Diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	38.4%	100%	100%	100%	100%	34.23%	34.23%
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	-	0%
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	45.8%	1750 Dokumen	1962 Dokumen	112.1%	1750 Dokumen	598 Dokumen	34.17%

Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	Persentase Peningkatan ASN yang lulus Ujian Kompetensi	100%		100%	101%	100.9%	100%	29.4%	29.4%
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	300 Orang		315 Orang	316 Orang	100.3%	120 Orang	138 Orang	115%
PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	Persentase Penanganan kasus Pelanggaran Disiplin ASN yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	52.8%	52.8%
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen					12 Dokumen	6 Dokumen	50%
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	125 Orang					0	-	0%
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	100%	5 Laporan	6 Laporan	120%	5 Laporan	3 Laporan	60%
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi	77.96%	100%	66.3%	60%	90%	100%	68%	68%
SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	Persentase ASN yang memiliki Sertifikat Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100%	100%	38%	38%	100%	100%	68%	68%
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	100%	38 Laporan	38 Laporan	100%	100 Laporan	68 Laporan	68%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Namun pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo belum mempunyai dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi aspek tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo.

Badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan Kota Gorontalo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pada Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Kota Gorontalo, dan melaksanakan tugas pokok sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pelaksanaan tugasn dukungan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo tersebut diatas maka indikator kinerja berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Indeks Profesionalitas ASN

2) Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian berbasis IT

Pengukuran capaian kinerja Sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama dan penjelasan dari capaian masing-masing IKU adalah sebagai berikut :

1. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kualitas ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai penilaian dan evaluasi tindak lanjut dalam upaya pengembangan profesionalisme Pegawai ASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan rumus sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

Pengukuran IP ASN meliputi 4 Dimensi dengan Bobot masing – masing dimensi adalah sebagai berikut :

1. Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi memiliki bobot 25%
2. Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi memiliki bobot 40%
3. Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja memiliki bobot 30%
4. Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin memiliki bobot 5%

Hasil evaluasi capaian/realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 yang dilakukan terhadap 3481 pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2.2

Analisis Capaian Kinerja untuk Sasaran strategis

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya Kualitas Sumber daya Aparatur				
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	65	54.5	83.84

Dengan nilai masing – masing dimensi sebagai berikut :

Tabel 2.3

Pengukuran Nilai Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022

No	Dimensi	Bobot Per Dimensi	Capaian Tahun 2022	Capaian (%)
1	Kualifikasi	25	13.18	52.72
2	Kompetensi	40	13.58	33.95
3	Kinerja	30	22.75	75.83
4	Disiplin	5	4.99	99.88
Nilai Akhir		100	54,5	

Berdasarkan tabel 3.1 dan tabel 3.3 diatas indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN belum mencapai target, dimana untuk tahun 2022 ditargetkan dengan nilai 65 akan tetapi realisasi nilai yang di capai 54.5 atau 83.84%, hal ini disebabkan seluruh ASN dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo belum melakukan pembaruan data terkait kompetensi yang mereka dapat dari berbagai pelatihan pengembangan diri pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dari Jumlah ASN Tahun 2022 hanya 3481 ASN yang berpartisipasi sehingga berdampak pada rendahnya Nilai IP ASN.

Dalam pencapaian indikator ini BKPP Kota Gorontalo melaksanakan kegiatan selama Tahun 2022 yang direncanakan pada Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo antara lain :

1. Menyelenggarakan kegiatan Ujian dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

Untuk pencapaian nilai dimensi Kualifikasi, Pada tahun 2022 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan telah melaksanakan ujian dinas dan penyesuaian ijasah kepada 112 Orang dan yang lulus dan memperoleh surat tanda kelulusan berjumlah 57 Orang seperti tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Data PNS yang mengikuti Ujian Dinas

No	Jenis Ujian Dinas	Jumlah Peserta (Orang)		
		Mendaftar	Lulus	Tidak Lulus
1	Ujian Dinas Tingkat I	85	41	43
2	Ujian Dinas Tingkat II	2	1	1
3	Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah (SMP-SMA)	6	4	2
4	Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah (S1- S2)	19	11	8

JUMLAH	112	57	54
Peserta yang Lulus		50,9	48,2

2. Pemberian Tugas Belajar

Dalam mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Peningkatan Pendidikan melalui pemberian tugas belajar bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/ atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

Untuk peningkatan kualifikasi pendidikan PNS, berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang memuat persyaratan tugas belajar, penyelenggaraan tugas belajar dan persyaratan program studi, pendanaan tugas belajar, jangka waktu tugas belajar, perpanjangan tugas belajar, tugas belajar berkelanjutan, kedudukan, hak dan kewajiban PNS yang melaksanakan tugas belajar, pembatalan dan penghentian tugas belajar, pemantauan dan evaluasi serta ketentuan lain yang terkait pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan.

Pada tahun 2022 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo memfasilitasi 21 orang PNS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi melalui pendidikan lanjutan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9

Data ASN yang mengikuti Tugas Belajar Tahun 2022

No	Tanggal Usulan	Nama Pegawai	Program Studi	Jenjang Pendidikan	Tanggal SK
1	03 Januari 2022	Diah Noorshanti Moo, ST	Program Pascasarjana Strata II (S2) Magister Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada Universitas Negeri Gorontalo	S2 paling lama 2 (dua) tahun	28/01/2022
2	4 Maret 2022	Ningsih Amuja, S.Pd	Program Pascasarjana Strata II (S2) Magister Ilmu Pendidikan pada Universitas Bina Taruna Gorontalo	S2 paling lama 2 (dua) tahun	06 April 2022
3	08 Juni 2022	Rofitra Vebriani Pagotja, A.Md.Keb	Program Diploma IV Kebidanan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu	D IV paling lama 4 (empat) tahun	07 Setember 2022
4	19 Juli 2022	dr. Trisna Silawati.Sp.A.M.Kes	Pendidikan Subspesialisasi Emergensi Dan Rawat Intensif Anak Pada Universitas Indonesia	Pendidikan Subspesialisasi Paling Lama 2 (dua) Tahun	
5	02 Agustus 2022	Suryanto Jaya Putra Haras	Program Studi Magister Hukum pada Pasca Sarjana Universitas Ichsan Gorontalo	S2 paling lama 2 (dua) tahun	07 Setember 2022
6	22 Agustus 2022	Olan Jusuf, S.ST	Program Studi Magister Ilmu Administrasi rogram Pasca Sarjana Universitas Bina Taruna Gorontalo	S2 paling lama 2 (dua) tahun	05 September 2022
7	24 Agustus 2022	Isma Abdul Gani, S.Kep., Ns	Program Studi Magister Manajemen Kesehatan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo	S2 paling lama 2 (dua) tahun	07 Setember 2022
8	7 september 2022	Nurdhani Muarif Makarawo, SH	Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo	S2 paling lama 2 (dua) tahun	29 September 2022
9	10 September 2021	Juliarto Sumilat, S. STP	Program Studi Magister Hukum pada Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo	S2 paling lama 2 (dua) tahun	23 Desember 2022
10	16 September 2022	Uswatun Hasanah, S.Pd	Program Studi Teknologi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Pendidikan	S2 paling lama 2 (dua) tahun	27 September 2022
11	20 September 2022	Romansyah Djafar, SH	Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo	S2 paling lama 2 (dua) tahun	23 September 2022
12	6 Oktober 2022	Kasmawaty Saleh	Sarjana S1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Gorontalo	S1 paling lama 4 (empat) tahun	10 Oktober 2022
13	10 Oktober 2022	Helena Sunge	Sarjana S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Universitas Terbuka Kota Gorontalo	S1 paling lama 4 (empat) tahun	31 Oktober 2022

14	10 Oktober 2022	Susanto Kablina, S.IP	Program Studi Magister Ilmu Administrasi Pemerintahan Daerah Program Pasca Sarjana Universitas Bina Taruna Gorontalo	S2 paling lama 2 (dua) tahun	10 Oktober 2022
15	17 Oktober 2022	Mohamad Iskandar Camaru, AMKL	Sarjana S1 Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Pada Universitas Gorontalo	S1 paling lama 4 (empat) tahun	
16	19 Oktober 2022	Zulkifli, AMKL	Sarjana S1 Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Pada Universitas Gorontalo	S1 paling lama 4 (empat) tahun	19 Oktober 2022
17	19 Oktober 2022	Yerry Biahimo, AMKL	Sarjana S1 Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Pada Universitas Gorontalo	S1 paling lama 4 (empat) tahun	19 Oktober 2022
18	19 Oktober 2022	Zenab Danial, AMKL	Sarjana S1 Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Pada Universitas Gorontalo	S1 paling lama 4 (empat) tahun	19 Oktober 2022
19	20 Oktober 2022	Salami Yunus, A.Md.Kes	Sarjana S1 Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Pada Universitas Gorontalo	S1 paling lama 4 (empat) tahun	20 Oktober 2022
20	27 Desember 2022	drg. Hendra Wahyudi Rumaggit	Program Studi Ilmu konservasi Gigi pada Universitas Hasanudin		
21	30 Desember 2022	Zefrin, M.Pd	Program Studi Doktor (S3) Pada Program Studi Pendidikan Dasar Negeri Yogyakarta	S3 paling lama 2 (dua) tahun	

3. Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan atau keahlian yang bukan lebih dari sekedar ketrampilan (skill), Kompetensi juga merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan pemahaman/pengetahuan, tindakan nyata serta proses mental yang terjadi dalam jangka waktu tertentu serta berulang-ulang sehingga menghasilkan kemampuan/keahlian dalam bidang tertentu. Kompetensi dibentuk oleh interaksi antara faktor pengalaman dan faktor bawaan. Kompetensi digunakan pula untuk menggambarkan pengelompokan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam pekerjaan.

Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil Negara dapat diperoleh melalui pengalaman pekerjaan, diklat dan tugas belajar. Seperti tersebut dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 pada pasal 4 ayat (1) setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja kompetensi PNS yang bersangkutan ayat (2) Hak dan Kesempatan untuk mengikuti pengembangan Kompetensi sebagaimana

dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) JP dalam 1 (satu) tahun.

Untuk itu dalam mencapai indikator sasaran Indeks profesionalitas ASN pada dimensi Kompetensi dapat dilihat pada tabel 3.3 pada Tahun 2022 meningkat dengan capaian 13.58% dibandingkan dengan tahun 2021 dengan capaian 11.01% ini dikarenakan adanya langkah – langkah yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo selain karena adanya Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pelatihan Pengembangan Kompetensi juga dengan dibuatkan aplikasi yakni Sistem Elektornik Informasi Kompetensi (SIERIK) yang sejak awal tahun 2022 dilaunching, aplikasi ini dapat memudahkan untuk memperoleh data terkait analisis kebutuhan diklat, kesenjangan pelatihan level individu dan pelatihan yang dapat diikuti oleh setiap ASN.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi berupa pendidikan dan pelatihan bagi ASN, baik fasilitasi, pengiriman maupun penyelenggaraan melalui Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Diklat Penjenjangan ASN melalui program pengembangan sumber daya manusia antara lain :

- a. Pelatihan / Bimbingan teknis kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian
- b. Pelatihan Dasar (Latsar)
- c. Orientasi PPPK
- d. Sosialisasi/ Diseminasi/Bimtek/Workshop bagi ASN

Berikut dapat dilihat kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo yang tertuang dalam Rencana Kerja BKPP Tahun 2022 dan juga ASN dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo yang memperoleh pengembangan kompetensi yang dilaporkan melalui aplikasi SIERIK pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10

Data Kegiatan Pengembangan Kompetensi BKPP Kota Gorontalo
Tahun 2022

No	Jenis Kegiatan	Jumlah ASN yang mengikuti	Metode yang digunakan
1	Bimbingan Teknis Kepegawaian serta penggunaan dan penerapan Aplikasi SIERIK bagi Pejabat	98 ASN	Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Klasikal

	Pengelola Kepegawaian dan Operator Simpeg OPD dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo		
2	Pelatihan Dasar (Latsar)	38 CASN	Pola Kontribusi
3	Orientasi PPPK		
4	Diklat Pejabat Fungsional	1 ASN	

Tabel 3.11

DATA ASN YANG MEMPEROLEH PENGEMBANGAN KOMPETENSI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SATUAN	JUMLAH ASN	JUMLAH PEGAWAI YANG MEMPEROLAH PENGEMBANGAN KOMPETENSI
1	BKPP KOTA GORONTALO	ASN	37	33
2	SEKRETARIAT DAERAH KOTA GORONTALO	ASN	115	60
3	BADAN KESBANGPOL KOTA GORONTALO	ASN	23	23
4	BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO	ASN	73	69
5	BLUD PROF. Dr.H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO	ASN	450	45
6	BPBD KOTA GORONTALO	ASN	32	15
7	BAPPELITBANG KOTA GORONTALO	ASN	38	35
8	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA GORONTALO	ASN	20	18
9	DKPP KOTA GORONTALO	ASN	80	43
10	DINAS DUKCAPIL KOTA GORONTALO	ASN	25	8
11	INSPEKTORAT KOTA GORONTALO	ASN	59	58
12	DINAS KOMINFO KOTA GORONTALO	ASN	28	21
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GORONTALO	ASN	43	12
14	DINAS PANGAN KOTA GORONTALO	ASN	24	5
15	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA GORONTALO	ASN	37	18

16	DPMPSTSP KOTA GORONTALO	ASN	31	15
17	DPPKBP3A KOTA GORONTALO	ASN	31	5
18	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA GORONTALO	ASN	31	17
19	DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO	ASN	483	198
20	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ASN	69	47
22	DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO	ASN	1413	66
23	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA GORONTALO	ASN	28	7
24	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN KOTA GORONTALO	ASN	32	8
25	DINAS PERHUBUNGAN KOTA GORONTALO	ASN	34	12
26	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	ASN	22	11
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ASN	68	11
28	SEKRETARIAT DPRD KOTA GORONTALO	ASN	25	20
29	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	ASN	36	9
30	RSUD OTANAHA KOTA GORONTALO	ASN	107	53
31	KECAMATAN DUMBO RAYA	ASN	41	11
32	KECAMATAN DUNGINGI	ASN	48	6
33	KECAMATAN HULONTHALANGI	ASN	41	6
34	KECAMATAN KOTA BARAT	ASN	59	7
35	KECAMATAN KOTA SELATAN	ASN	46	8
36	KECAMATAN KOTA TENGAH	ASN	39	5
37	KECAMATAN KOTA TIMUR	ASN	52	13
38	KECAMATAN KOTA UTARA	ASN	45	4
39	KECAMATAN SIPATANA	ASN	40	6
TOTAL			3905	1008

4. Penegakan serta Peningkatan disiplin dan kinerja PNS Kota Gorontalo.

- Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diberikan

secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di luar gaji, tunjangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tunjangan Jabatan Administrasi dan tunjangan jabatan fungsional. Dasar penetapan besaran TPP berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 41 Tahun 2021. Parameter pemberian TPP yakni Parameter berdasarkan Prestasi kerja.

Pemberian TPP ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.

- Penegakan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Penegakan disiplin bagi aparatur sipil negara di instansi Pemerintah Kota Gorontalo dilakukan secara terus menerus. Pada Tahun 2022 jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan berjumlah 26 kasus yang terdiri dari 3 jenis hukuman disiplin seperti tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12

Data Hukuman Disiplin Tahun 2022

NO	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	TAHUN
		2022
A	RINGAN	
1	Teguran Lisan	6
2	Teguran Tertulis	6
3	Pernyataan Tidak Puas secara tertulis	6
Jumlah Hukuman Disiplin Ringan		18
B	SEDANG	
1	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	2
2	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	-
3	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	1
Jumlah Hukuman Sedang		3

C	BERAT	
1	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	
2	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	
3	Pembebasan dari jabatan	
4	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	4
5	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	1
Jumlah Hukuman Berat		5
Total Per Tahun		26
Jumlah Pegawai		3905
persentase ASN yang memperoleh hukuman disiplin		0,66%

- Pemberian tanda kehormatan satyalancana karya satya

Bentuk perhatian Pemerintah terhadap ASN yang memiliki loyalitas, kinerja dan prestasi yang baik diwujudkan dengan pemberian berbagai penghargaan, salah satunya adalah dengan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya. Penganugerahan Satyalancana Karya Satya merupakan penghargaan dari Negara terhadap PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta penuh dengan pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin, sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai yang lainnya. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya PNS dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Satyalancana Karya Satya berwarna perunggu, diberikan kepada PNS yang bekerja terus menerus dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
2. Satyalancana Karya Satya berwarna perak, diberikan kepada PNS yang bekerja terus menerus dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.
3. Satyalancana Karya Satya berwarna perunggu, diberikan kepada PNS yang bekerja terus menerus dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Berikut data Pemberian Penghargaan Satya Lencana dari Tahun 2020 sampai dengan 2022

Tabel 3.13

Pemberian Penghargaan Satya Lencana dari Tahun 2020 sampai dengan 2022

No	Masa Kerja	Jumlah			Total
		s/d 2020	2021	2022	
I	30	388	53	13	454
	Tahun				
II	20	543	71	32	646
	Tahun				
III	10	741	265	70	1076
	Tahun				
Jumlah		1672	389	115	2.176

- Pemberian penghargaan kepada ASN dalam kegiatan penganugerahan BKPP Award Tahun 2022

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, bahwa kepada ASN yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Untuk itu, dalam rangka membangun budaya kerja yang kompetitif, serta untuk memperbaiki kualitas manajemen SDM Aparatur dalam perspektif implementasi sistim merit, Pemerintah Kota Gorontalo berupaya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada ASN dan Perangkat Daerah yang berprestasi, dengan kinerja melampaui ekspektasi individu maupun Unit kerja selama Tahun 2022 ini melalui ajang anugerah BKPP Award Tahun 2022.

Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan motivasi dan inspirasi di jajaran ASN untuk terus meningkatkan kualitas, kompetensi dan kinerja serta menjadi teladan bagi ASN lainnya.

Dalam kegiatan BKPP award ada beberapa nominasi penghargaan yang terdiri dari :

- Berdisiplin tinggi;
- Berkinerja tinggi;
- Inovatif;
- Inspiratif;
- Berprestasi;

- Pengelolaan kepegawaian terbaik
- Operator Pengelola Layanan Kepegawaian terbaik

Dengan kategori terdiri dari :

- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- Pejabat Administrator;
- Pejabat Pengawas;
- Camat dan Lurah;
- Pejabat Pelaksana;
- Pejabat Fungsional Teknis;
- Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan;
- Pejabat Fungsional Tenaga Pendidikan;
- Pejabat Pengelola Kepegawaian;
- Operator Pengelola Layanan Kepegawaian; dan
- Perangkat Daerah.
- Operator Pengelola Layanan Kepegawaian terbaik

Terhadap hasil evaluasi capaian/realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022, Terdapat hambatan dan pendorong dalam pencapaian Indeks Profesionalitas ASN, Faktor Penghambat pencapaian IP ASN antara lain :

- Belum ditetapkan Rencana Pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN yang didukung oleh anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
- Belum adanya Beasiswa bagi PNS untuk Peningkatan Kualifikasi Melalui Jalur Pendidikan Formal
- Kurangnya Pembinaan dan Pengawasan dari Atasan terhadap Disiplin Pegawai Dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah

Untuk itu, beberapa langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

- Menyusun Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi
- Evaluasi dan Monitoring Pembinaan dan Pengawasan Disiplin Di setiap Organisasi Perangkat Daerah
- Mendorong Kesadaran PNS dalam Meningkatkan Kualitas dan Kualifikasi Melalui Pendidikan Lanjutan

2. **Indeks Kepuasan terhadap layanan administrasi kepegawaian berbasis IT**

Sesuai amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan public sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan publik yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya adalah melalui survey kepuasan masyarakat yaitu kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sebagaimana diatur dalam Permenpan RB RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Instansi Pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik baik yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, wajib melakukan survey kepuasan masyarakat secara periodik dilingkungan masing – masing minimal 1 (satu) tahun sekali.

Untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan sebagai upaya perbaikan kinerja pelayanan publik kepada masyarakat serta mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo melaksanakan survey kepuasan masyarakat khusus pelayanan administrasi kepegawaian Tahun 2022.

Pengukuran Indeks Kualitas Layanan diukur dengan menggunakan rumus pengukuran skala likert sebagaimana disebutkan dalam dalam Permenpan RB RI Nomor 14 Tahun 2017 yang cara pengukurannya adalah :.

“ Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama.

Hasil evaluasi capaian/realisasi Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian berbasis IT Tahun 2022 yang dilakukan terhadap 200 responden pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.15

Analisis Capaian Kinerja untuk Sasaran strategis

Sasaran Strategis 2				
Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan yang berkualitas Prima				
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian berbasis IT	Persen	85	91.11	107.18

Capaian indikator kinerja ini adalah 107.18% atau **sangat baik**. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan di Kota Gorontalo dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Berdasarkan hasil survey indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian tahun 2022 yang diperoleh dari pengolahan kuesioner yang dibagikan kepada 200 responden, secara keseluruhan kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dikategorikan **baik**, dengan nilai rata-rata unsur pelayanan yang memperoleh nilai tertinggi (3,95) adalah unsur **biaya/tarif** dikarenakan menurut responden yang telah disurvei semua pelayanan administrasi kepegawaian di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo tidak dipungut biaya atau gratis, sedangkan unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah (3,49) adalah unsur **Waktu Penyelesaian**, hal ini penyebabnya adalah kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.

Berikut ini adalah data capaian unsur pelayanan serta analisis capaian :

Tabel 3.16

DATA CAPAIAN UNSUR PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan	3,50
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,53
3	Waktu penyelesaian	3,49

4	Biaya/Tarif	3,95
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,60
6	Kompetensi Pelaksana	3,59
7	Perilaku Pelaksana	3,64
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,91
9	Sarana dan Prasarana	3,61
	Jumlah Nilai	3,60639
	Nilai IKM = Nilai Indeks x Nilai Dasar 3.64444 x 25	91.11
	CAPAIAN KINERJA	106%

Sebagaimana terlihat pada data diatas, tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan BKPP Kota Gorontalo sebesar 91.11% berada pada interval mutu “A” dengan kategori kinerja unit pelayanan “sangat baik”. Selanjutnya dalam rangka pencapaian indikator kinerja indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian, BKPP melaksanakan Program Kepegawaian Daerah yang dijabarkan dalam 5 Sub Kegiatan dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 1.284.166.148,- atau setara 94.41% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.378.991.025,- dengan rata-rata capaian output 100% sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2022		
		PAGU		PERSENTASE KEUANGAN
		TARGET	REALISASI	
1	Program Kepegawaian Daerah	1.378.991.025	1.284.166.148	94.41
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	938.709.725	852.911.838	90.86
1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	383.365.350	315.302.290	82.25
1.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	54.383.100	52.334.900	96.23
1.3	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	61.148.650	51.365.541	84.00
1.4	Pengelolaan sistem Informasi Kepegawaian	68.000.000	68.000.000	100.00
1.5	Pengelolaan Data Kepegawaian	371.812.625	365.909.107	98.41
2	Mutasi dan Promosi	440.281.300	431.254.310	98.32
2.1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat	247.615.400	245.720.460	99.23
2.2	Pengelolaan Promosi ASN	192.665.900	185.533.850	96.30

Adapun perbandingan kinerja berdasarkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.17
Data Survey IKM 2020 - 2022

Tahun	Jumlah Responden	Unsur Tertinggi	Unsur Terendah	Nilai	Mutu	Kinerja
2020	200	Unsur Biaya/Tarif(U4)	Unsur Persyaratan (U1)	81.35	B	Baik
2021	200	Unsur Biaya/Tarif(U4)	Unsur Biaya/Tarif (U4)	90,16	A	Sangat Baik
2022	200	Unsur Biaya/Tarif(U4)	Unsur Biaya/Tarif (U4)	91.11	A	Sangat Baik

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2022 melampaui target dari target kinerja 85% dengan realisasi 91.11% atau capaian 106%. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0.95 point. Hal ini disebabkan karena adanya upaya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo melalui Bidang Mutasi, Pensiun, Status dan Informasi Administrasi ASN dalam meningkatkan pelayanan dibidang kepegawaian antara lain :

1. Layanan Pengurusan Kenaikan Pangkat
2. Layanan Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala
3. Layanan Pengurusan Pensiun untuk PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun
4. Layanan Pengurusan Administrasi Kepegawaian Lainnya

Pada Tahun 2022 BKPP Kota Gorontalo telah memberikan layanan pengurusan administrasi kepegawaian dan diselesaikan tepat waktu seperti dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.18

Data Layanan Pengurusan administrasi kepegawaian yang diselesaikan Tahun 2022

Jenis Layanan	Usulan	Realisasi	Diselesaikan tepat waktu
Kenaikan Gaji Berkala	2275	1962	1962
Kenaikan Pangkat	972	716	716
Pensiun Pegawai	201	201	201
Karis/Karsu	36	36	36
Karpeg	118	118	118

Meskipun telah melebihi target BKPP tetap melakukan upaya untuk perbaikan pelayanan kepegawaian secara keseluruhan antara lain :

1. Peningkatan produktivitas seluruh pegawai supaya dapat mengoptimalkan waktu pengerjaan di semua bidang layanan
2. Secara terus menerus mengembangkan system kepegawaian, sampai dengan tahun 2022 BKPP Kota Gorontalo telah mengembangkan SIMPEG online sehingga memudahkan pengurusan administrasi oleh seluruh ASN. Aplikasi tersebut dapat dilihat lebih rinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.19

Aplikasi Layanan Kepegawaian dan Kegunaannya

No	Nama Aplikasi	Fungsi Aplikasi
1	E-Kenpa	Aplikasi ini digunakan untuk pengusulan kenaikan pangkat bagi PNS secara elektronik
2	E-KGB	Aplikasi ini digunakan untuk memberikan pelayanan Usul Kenaikan Gaji Berkala PNS secara elektronik
3	SIPEKAKA	Aplikasi ini memberikan Pelayanan Usul Pensiun/Karis/su dan Karpeg secara elektronik
4	Digital Repository	Aplikasi ini menyediakan Tempat dokumen Kepegawaian secara online yang bias diakses

		kapanpun dan dimanapun serta pencetakan profil ASN
5	Si-Erik (Sistem Elektronik Informasi Kompetensi)	Aplikasi yang memperoleh data perencanaan pengembangan kompetensi ASN
6	Sistem Informasi Mutasi Pegawai Terintegrasi (Simpati)	Aplikasi yang ditujukan untuk penyelenggaraan mutasi pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
7	Elektronik Carir Development (E-CD)	Penyelenggaraan Manajemen Karir Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil
8	Simpeg	Aplikasi yang ditujukan untuk melakukan pengelolaan data kepegawaian
9	Si-Ben (Sistem Ujian Berbasis Elektronik)	Aplikasi yang digunakan untuk Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijasah menggunakan sistem CAT
10	E-kinerja (Kinerja Online)	Aplikasi yang ditujukan untuk menyusun SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) serta mengukur kinerja individu secara bulanan dan tahunan
11	Sijabti (Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)	Aplikasi yang ditujukan untuk informasi pendaftaran Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka

Tabel TC. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks profesionalitas ASN			60	65	65	65	65	50.71	54.5	60	65	Realisasi 2021 dan proyeksi 2022 memakai angka Nilai
2	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian IT			80	85	85	85	85	90.16	91.11	92	95	Realisasi 2021 dan proyeksi 2022 memakai angka Nilai

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Tuntutan visi keempat Walikota Gorontalo yakni Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, kapasitas organisasi pemerintah, dan kualitas sumber daya aparatur dituangkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo dalam sasaran startegisnya yakni meningkatnya pengembangan sumber daya aparatur dan Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dengan mengedepankan penanganan isu-isu yang berkembang serta permasalahan permasalahan dibidang kepegawaian dan Diklat. Capaian kinerja pelayanan BKPP sampai dengan tahun 2022 antara lain :

1. Indeks Profesional ASN capaian kinerja 83.8 %
2. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian IT Capaian Kinerja 107.18%

Dari 2 indikator kinerja diatas dua indikator masih masih perlu mendapat perhatian yaitu indikator 1 “Indeks Profesionalitas ASN” karena realisasinya masih rendah. Pemerintah Kota Gorontalo yang tinggi terhadap peningkatan kompetensi aparatur akan menjadi salah satu pendorong dalam meningkatkan capaian kinerja tersebut. Adapun beberapa isu penting dalam peningkatan kinerja BKPP antara lain :

➤ **Profesionalisme aparatur sebagai pelayan publik**

Tuntutan masyarakat akan profesionalisme aparatur semakin besar, sehingga kinerja pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan aparatur pemerintah menjadi sangat sensitif. Banyak variabel tentang bagaimana aparatur yang profesional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tunjangan daerah yang diberikan Pemerintah selayaknya berbanding lurus dengan kinerja pegawai. Beberapa pegawai memiliki kapasitas yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan, disisi lain masih banyak pegawai yang mau bekerja kalau diperintah atasan. Agar diperoleh SDM yang bermutu, pekerjaan yang dilaksanakan akan menghasilkan sesuatu yang memang dikehendaki antara lain kesesuaian jabatan dan pekerjaan dengan kemampuan, kecakapan, keterampilan, kepribadian, sikap dan perilaku, sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan tepat waktu

➤ **Belum optimalnya Disiplin aparatur**

Hal ini ditandai dengan kurangnya disiplin aparatur baik itu disiplin waktu maupun disiplin kerja, kurangnya pemahaman terhadap tupoksi, kompetensi kerja serta kemampuan berinovasi yang masih rendah, penempatan aparatur belum berdasarkan kompetensi.

- Belum Optimalnya Pemetaan Kompetensi Pegawai.

Dengan adanya Undang-undang ASN maka kompetensi aparatur menjadi kunci sukses penyelenggaraan pemerintahan. Kompetensi adalah segenap pengetahuan, keterampilan dan sikap secara terpadu dimiliki oleh individu pegawai agar senantiasa siap dalam melaksanakan pekerjaan. Kompetensi setiap individu harus terus didorong untuk terus meningkat yaitu pencapaiannya melalui pendidikan formal, kursus dan diklat serta perubahan mindset (Pola pikir) ke arah yang lebih positif. Untuk menyiapkan SDM aparatur yang kompeten dan dapat diandalkan maka diperlukan suatu pemetaan kompetensi terhadap seluruh aparatur pemerintah Kota Gorontalo agar lebih mudah dalam pengelolaan pengembangannya dimasa depan

- Belum Optimalnya Layanan Adminitrasi Kepegawaian

Pengelolaan data dan pelayanan informasi kepegawaian aparatur daerah yang cepat, tepat dan aktual masih perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Reviu terhadap rancangan awal RKPD merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana kerja. Bagian ini berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap rumusan program dan kegiatan yang sesuai dengan rancangan awal SKPD, termasuk dalam hal penganggaran. Tahapan rancangan awal SKPD disajikan dalam tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Gorontalo Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.727.900.049	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.871.097.550		
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	8 dokumen	92.918.026	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	8 Dokumen	95.240.977		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	35.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 dokumen	35.875.000		
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	10.050.900	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	10.302.173		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	10.050.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	10.301.250		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	16.817.126	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	17.237.554		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	3 laporan	21.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	12 Dokumen	21.525.000		
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.141.872.188	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.245.418.993		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang	4.059.072.188	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 kali	4.160.548.993		
	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 dokumen	75.000.000	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 kali	76.875.000		

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	7.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	7.995.000		
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	22.000.000	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	22.550.000		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	12 laporan	22.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	12 laporan	22.550.000		
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah'	100%	50.320.000	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah'	100%	51.578.000		
	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	15.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	15.375.000		
	Bimbingan Teknis Impelentasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	35.320.000	Bimbingan Teknis Impelentasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	36.203.000		
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah Layanan Administrasi Umum	100%	388.302.363	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah Layanan Administrasi Umum	100%	398.009.922		
	Penyediaan Komponen Intalasi Listri/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	12 paket	3.493.171	Penyediaan Komponen Intalasi Listri/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	12 paket	3.580.500		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	48.641.864	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	49.857.911		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	12 paket	72.537.971	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	12 paket	74.351.420		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	12 paket	41.931.594	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	12 paket	42.979.884		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	21.697.763	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	22.240.207		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	205.000.000		
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	22 unit	158.551.625	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	13 Unit	162.515.416		

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	60.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	61.500.000		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 unit	21.151.625	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 unit	21.680.416		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya Yang Disediakan	5 Unit	77.400.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya Yang Disediakan	5 Unit	79.335.000		
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kali	604.835.847	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kali	619.956.743		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	4.635.847	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	4.751.743		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	370.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	379.455.000		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	230.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	235.750.000		
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	100 persen	269.100.000	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	100 Persen	275.827.500		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 unit	51.250.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	1 Unit	200.100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	1 Unit	205.102.500		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	11 unit	19.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	11 unit	19.475.000		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	97%	2.415.599.000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	97%	2.475.988.975		
	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	Jumlah Pengadaan ASN	45%	830.600.000	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	Jumlah Pengadaan ASN	45%	851.365.000		
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk	0 dokumen	-	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk	0 dokumen	0		

		pelaksanaan pengadaan ASN				pelaksanaan pengadaan ASN				
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	300.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	307.500.000		
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	110 dokumen	75.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	110 dokumen	76.875.000		
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 lembaga	200.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 lembaga	205.000.000		
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	1 dokumen	80.600.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	1 dokumen	82.615.000		
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	12 dokumen	175.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	12 dokumen	179.375.000		
	MUTASI DAN PROMOSI ASN	Jumlah Kegiatan Mutasi dan Promosi	15%	649.999.000	MUTASI DAN PROMOSI ASN	Jumlah Kegiatan Mutasi dan Promosi	15% 15 Kegiatan	666.248.975		
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	1 dokumen	300.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	1 dokumen	307.500.000		
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	1 dokumen	200.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	1 dokumen	205.000.000		
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	1 dokumen	149.999.000	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	1 dokumen	153.748.975		
	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi	2 Orang	202.000.000	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi	2 Orang	207.050.000		
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	300 orang	202.000.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang memperoleh Peningkatan Kapasitas	204 ASN	207.050.000		
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	0	0	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	0	0		
	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	0	0	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	0	0		

	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Yang mendapatkan layanan pengembangan karir	1 Orang	0	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Pejabat Fungsional/Widyaiswara yang terfasilitasi pengembangan karir jabatan fungsional	1 Orang	0		
	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	Persentase Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur	100%	733.000.000	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	Persentase Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur	100%	751.325.000		
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	273.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	279.825.000		
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN Yang Diberikan Penghargaan	125 orang	100.000.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN Yang Diberikan Penghargaan	125 orang	102.500.000		
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	3 orang	210.000.000	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	3 orang	215.250.000		
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan pengelolaan Penyelesaian Disiplin ASN	1 laporan	150.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan pengelolaan Penyelesaian Disiplin ASN	1 laporan	153.750.000		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	49%	242.088.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	49%	683.848.160		
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN mengikuti diklat teknis	100 ASN	0	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN mengikuti diklat teknis	100 ASN	436.918.400		
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	0	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	0		
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN mengikuti pengembangan kompetensi	120 orang	0	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN mengikuti diklat teknis	120 orang	0		
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Struktural	120 orang	242.088.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Struktural	100 ASN	246.929.760		

	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah laporaan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	1 laporan	242.088.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah laporaan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	1 laporan	246.929.760		
--	--	--	-----------	-------------	--	--	-----------	-------------	--	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

a. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo

Tujuan yang dirumuskan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan manajemen kepegawaian selama kurun waktu lima tahun adalah ***“Terwujudnya pengelolaan kepegawaian yang efisien, efektif dan akuntabel”***.

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah adalah :

1. Meningkatnya kualitas pengembangan ASN
2. Meningkatnya kualitas layanan kesejahteraan dan Pembinaan ASN
3. Meningkatnya sistem pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi Kepegawaian
4. Menurunnya jumlah pengaduan.

b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi (PAN-RB) memiliki visi ***“Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Yang Berkepribadian, Bersih dan Kompeten untuk mencapai Kualitas Pelayanan Publik Yang Berkinerja Tinggi*** dan Misi : ***Penggerak Utama Reformasi Birokrasi***. Hal ini dicapai dengan tujuan strategis yaitu :

1. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien
2. Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkompeten dan kompetitif
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi
4. Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas
5. Terwujudnya aparatur Kementerian PAN-RB yang profesional dan berkinerja tinggi

c. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai hubungan fungsional dan profesional baik langsung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang ada di Pusat,

Maupun dengan kantor-kantor regional Badan Kepegawaian Negara yang tersebar di delapan wilayah kerja.

Sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Negara antara lain :

- Peningkatan layanan publik terkait dengan bidang kepegawaian dan kediklatan dan reformasi birokrasi yang baik, cepat dan murah.
- Mewujudkan netralitas pegawai dalam melaksanakan proses demokratisasi dan layanan publik.
- Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana serta peraturan perundang-undangan yang jelas untuk mengubah perilaku aparatur yang bebas dari KKN.
- Pengembangan lembaga diklat menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui diklat struktural,teknis dan fungsional
- Memanfaatkan produk-produk hukum bidang kepegawaian dan kediklatan untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga teknis lainnya.
- Mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang akurat dan valid dengan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pembinaan kepegawaian dan kediklatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan telah melakukan Revisi Renstra Tahun 2019 – 2024 berdasarkan Revisi RPJMD Tahun 2019 – 2024 dengan merumuskan tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

➤ Meningkatkan Pengelolaan Manajemen ASN” dengan sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur
2. Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan yang berkualitas Prima
3. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD

Sasaran tersebut diatas diukur dengan indikator kinerja yang untuk tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut :

a. *Indeks Profesionalitas ASN*

Pada renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo ditetapkan target capaian sampai dengan tahun 2024 skor/Indeks 65

b. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Berbasis IT

Pada renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo ditetapkan target capaian sampai dengan tahun 2024 skor/Indeks 85

c. Nilai AKIP

Pada renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo ditetapkan target capaian sampai dengan tahun 2024 Nilai 90

d. Persentase Hasil Temuan yang ditindaklanjuti

Pada renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo ditetapkan target capaian sampai dengan tahun 2024 adalah 80 %

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2024 perubahan didasarkan pada faktor pertimbangan logis dan strategis dalam rangka mendukung visi dan misi Walikota Gorontalo Tahun 2019-2024, implementasi reformasi birokrasi, perbaikan sistem manajemen kepegawaian, perbaikan pelayanan kepegawaian, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/418/Keuda Tahun 2020 tentang Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, antara program dan kegiatan tahun 2024 tidak berbeda dengan program dan kegiatan tahun 2023.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo tahun 2023 perubahan memiliki 3 program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut diampu oleh 2 bidang dan 1 sekretariat.. Program dan kegiatan tahun 2024 sebagaimana tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
T-C 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SATUAN	Rencana Tahun 2023				Rencana Perubahan Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3		4	5	6	7	5	6	7	8	9	10
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pengangkatan ASN dalam Jabatan Sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi Yang Dibutuhkan Organisasi	Persen		95%		PAD	96%	1.350.976.265			95%	
								95%					
								97%					
5.03.02.2.01	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN yang Diangkat Berdasarkan Formasi Yang Di Tetapkan	Persen		100	512.589.230	PAD	96%	254.169.200	PAD		100	683.258.131
								95%					
								97%					
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen		2	164.392.600	PAD	2 Dokumen	122.486.600	PAD		2	272.403.600
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen		1	73.384.000	PAD	1 Dokumen	26.684.000	PAD		1	82.925.220
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN Yang Difasilitasi	Lembaga		1	36.794.130	PAD	1 Lembaga	18.397.100	PAD		1	53.849.596
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		1	88.890.000	PAD	1 Dokumen	62.850.000	PAD		1	103.309.500
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen		12	149.128.500	PAD	12 Dokumen	23.751.500	PAD		12	170.770.215
5.03.02.2.02	Mutasi Dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi Yang Diproses	Persen		97%	576.503.820	PAD	96%	499.573.340	PAD		97%	812.490.504

		Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku					95%						
							97%						
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen		2	344.241.400	PAD	2 Dokumen	357.699.400	PAD		2	383.405.295
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen		1000	180.998.820	PAD	2 Dokumen	94.725.740	PAD		1000	175.377.174
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen		3	51.263.600	PAD	3 Dokumen	47.148.200	PAD		3	253.708.035
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN Yang Meningkatkan Kompetensinya	Persen		95%	442.970.275	PAD	96%	347.960.325	PAD		95%	510.010.351
								95%					
								97%					
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN Yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang		489	442.970.275	PAD	120 Orang	347.960.325	PAD		489	510.010.351
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Persen		97%	448.193.400	PAD	96%	249.273.400	PAD		97%	455.190.756
								95%					
								97%					
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen		12	245.402.600	PAD	12 Dokumen	158.206.600	PAD		12	213.541.230
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN Yang Diberikan Penghargaan	Orang		268	139.857.400	PAD	100 Orang	60.581.400	PAD		268	147.303.450
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan		5	62.933.400	PAD	5 Laporan	30.485.400	PAD		5	94.346.076
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN Yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi					PAD	71.9%	96.889.800				

5.04.02.2.02	Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Yang Memiliki Sertifikat Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persen		66.3%	94.164.000	PAD	71.9%	96.889.800	PAD		66.3%	98.872.200
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan		1	94.164.000	PAD	¹ Laporan	96.889.800	PAD		1	98.872.200
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		100%	6.288.073.72 ₄	PAD	100%	5.953.835.331			100%	6.336.718.723
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja	Persen		100%	67.302.200	PAD	100%	24.064.935			100%	153.566.700
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		4	67.302.200	PAD	⁴ Dokumen	11.291.435	PAD		4	91.506.660
5.03.01.2.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		4	-		⁴ Dokumen	-	DAU		4	8.227.170
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		4	-		⁴ Laporan	-	DAU		4	53.832.870
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		4	23.128.600	PAD	⁴ Laporan	12.773.500	PAD		4	29.834.700
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Daerah	Persen		100%	4.852.783.50 ₁	DAU	100%	4.636.786.357			100%	4.659.784.207
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		41	4.731.581.50 ₁	DAU	⁴¹ Orang/Bulan	4.588.408.857	DAU		41	4.450.741.807

5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	121.202.000	PAD	12 Dokumen	48.377.500	PAD	12	183.739.500
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	-	PAD	1 Laporan	-	DAU	1	25.302.900
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Barang Milik Daerah	Persen	100%	39.724.000	PAD	100%	11.921.900		100%	71.582.700
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan	12	39.724.000	PAD	12 Laporan	11.921.900	PAD	12	71.582.700
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100%	26.356.000	PAD				100%	
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	26.356.000	PAD				12	69.568.800
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	-	PAD				3	35.000.000
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum	Persen	100%	486.064.155	PAD	100%	462.106.033		100%	461.766.327
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	4.949.500	PAD	12 Paket	4.949.500	PAD	12	3.894.135
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	37	46.771.700	PAD	37 Paket	49.371.400	PAD	37	47.879.790
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	12	70.877.000	PAD	12 Paket	63.167.200	PAD	12	69.107.430
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Baran Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	12	35.957.800	PAD	12 Paket	34.212.763	PAD	12	37.755.900
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	41.581.300	PAD	12 Laporan	59.293.900	PAD	12	29.790.075
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	285.926.855	PAD	30 Laporan	251.111.270	PAD	30	273.338.997

5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Dan Prasarana dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		100%	104.373.500	PAD	100%	1.360.000			100%	153.143.025
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Paket		7	34.874.900	PAD	5 Unit	680.000	PAD		7	124.260.255
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	unit		8	69.498.600	PAD	9 Unit	680.000	PAD		8	28.882.770
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		100%	515.723.788	PAD	100%	749.771.456			100%	550.417.862
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12	9.100.000	PAD	12 Laporan	4.100.000	PAD		12	9.555.000
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Laporan		12	387.023.788	DAU	12 Laporan	360.455.456	DAU		12	395.437.862
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan		12	119.600.000	DAU	12 Laporan	385.216.000	PAD		12	145.425.000
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Yang Dipelihara	Persen		100%	195.746.580	PAD	100%	67.824.650			100%	286.457.902
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		7	43.420.580	PAD	7 Unit	49.434.650	PAD		7	45.661.402
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung		1	129.996.000	PAD	1 Unit	-			1	217.350.000
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		12	22.330.000	PAD	12 Unit	18.390.000	PAD		12	23.446.500

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

Renja Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2023 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019 - 2024. Rencana Kerja ini memuat arah dan kebijakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selama 1 (satu) tahun dan menjadi dasar perumusan kegiatan.

Output Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo adalah Program Tahunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Adapun Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo dan Pendanaannya sebagai berikut:

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan BKPP Kota Gorontalo Tahun 2023 Perubahan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penataan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	
		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Komponen Intalasi Listri/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	Koordinas dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
			Koordinasi Pelaksanan Administrasi Pemberhentian	
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	

			Pengelolaan Data Kepegawaian	
		MUTASI DAN PROMOSI ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
			Pengelolaan Promosi ASN	
		Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	
		PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2023 merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023. Esensi dari semua program dan kegiatan ini adalah bahwa semua pihak atau para stakeholder yang memiliki peran dalam program dan kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo diharapkan dapat mengamankan semua kebijakan yang ada dan dengan sungguh-sungguh dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing unit kerja.


Selain itu, Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo merupakan dasar evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai kinerja tahunan BKPP Kota Gorontalo yang berarti bahwa setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, transparan dan akuntabel.

Rencana kerja Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo dapat terlaksana apabila mendapat perhatian dan dukungan dari semua pihak dan tersedianya anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo dibuat untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan pelayanan Kepegawaian dan Diklat di Kota Gorontalo.

Gorontalo, Juli 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
GORONTALO**



Drs. H. BEN IDRUS, M.Pd
NIP. 19641215 199003 1 009